

Persepsi Kader Posyandu tentang Penggunaan Sistem Informasi Posyandu di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman

Tyas Ning Yuni Astuti Anggraini^{1*}, Ekawati², Kharisma³

^{1,2,3} Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

*Email: 10anggra@gmail.com

*Penulis korespondensi: Jl. Brawijaya, Jl. Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55294

INFO ARTIKEL

Riwayat Naskah
Dikirim (4 Januari 2023)
Direvisi (26 Januari 2023)
Diterima (27 Januari 2023)

Kata Kunci

**Persepsi
Posyandu
Kader
Sistem Informasi**

ABSTRAK

Proses pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia secara rutin setiap bulan dilakukan di Posyandu. Berdasarkan studi pendahuluan melalui Bidan desa, terdapat permasalahan terkait pengumpulan data posyandu yaitu data diisi dalam bentuk format lalu dikirimkan ke Bidan Desa setiap 1 bulan sekali, namun kader tidak tepat waktu mengumpulkan. Jika data dalam bentuk manual ini terdapat kesalahan dan kekurangan, maka berakibat pada data Posyandu yang tidak tepat sehingga pengambilan keputusan di Desa bisa kurang tepat yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan dalam menanggulangi kesehatan ibu dan anak. Dalam era yang modern seperti saat ini, dimungkinkan untuk menghemat waktu dan tenaga yaitu dengan sistem komputerisasi. Namun, system inipun diharapkan bisa memudahkan para kader, maka studi ini melihat bagaimana pandangan kader posyandu terkait penggunaan system informasi posyandu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan subyek penelitian menggunakan purposive sampel yakni di seleksi dari beberapa kader Posyandu di desa Sukoharjo, yang berjumlah 13 orang. Pengambilan data menggunakan teknik fokus grup discussion dan observasi terkait dengan pengembangan system informasi. Kader berusia muda (31-47 tahun) sebanyak 8 orang (62%), mayoritas berpendidikan SMA sebanyak 8 orang (62%) dan bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 9 orang (69%). Pelaksanaan pelaporan menggunakan system informasi pada awalnya mengalami penolakan dikarenakan kebutuhan peralatan yang diharapkan terpenuhi seperti: handphone, akses internet dan pelatihan. Sesuai hasil diskusi dengan kader, system informasi di Posyandu harus dapat memfasilitasi tiga hal yaitu handphone, akses internet, dan pelatihan. Diharapkan pula memilih kader yang sesuai agar lebih mudah menggunakan sistem informasi Posyandu.

PENDAHULUAN

Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang pengelolaannya dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Dalam hal ini Posyandu dapat digunakan pemberdayaan masyarakat guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar (1). Posyandu terdiri atas Posyandu balita, lansia, dan remaja. Khusus pada Posyandu balita dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

bagi ibu, bayi, dan anak balita. Pola pemberdayaan masyarakat di tingkat Posyandu, dapat menjadi upaya promotif dan preventif terutama untuk anak. Apalagi jika kita lihat angka stunting di Indonesia yang saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

Pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020-2024 tertera untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar berupa kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu fokus utama pemerintah yaitu target menurunkan angka stunting dari 27,7% ke 14%. Arah kebijakannya yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi (2). Pelayanan dasar dapat dilakukan pada tingkat Posyandu. Perlu adanya inovasi pada penguatan Posyandu balita agar mampu menjawab kebutuhan pemantauan tumbuh kembang anak agar kejadian stunting dapat terpantau.

Demikian pula tertera pada percepatan penurunan stunting yang tertera pada Perpres nomor 72 tahun 2021 salah satu bentuk tanggung jawab Posyandu kedepannya yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2024 terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu sebesar 90% (3). Sedangkan jika dilihat dari kondisi di DIY sendiri, partisipasi aktif masyarakat datang ke Posyandu pada tahun 2021 didasarkan pada jumlah Balita yang ditimbang baru mencapai 65,3% (4). Tentu saja peran dari adanya modernisasi Posyandu melalui system informasi pada pencatatan diharapkan akan dapat membantu pelayanan yang lebih baik, yakni peningkatan pemantauan tumbuh kembang di Posyandu.

Posyandu melakukan pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak secara rutin disetiap bulannya. Pemantauan terhadap ibu hamil dilakukan untuk menemukan ibu hamil dengan risiko tinggi agar segera dilakukan upaya pencegahan dan masyarakat siap merujuk ke petugas kesehatan pada saat akan melahirkan untuk menghindari terjadinya kematian ibu. Sedangkan pemantauan terhadap kesehatan anak balita dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan status gizi balita secara terus menerus. Untuk mendukung peran Posyandu dalam memantau kesehatan ibu dan anak, saat ini telah dibuat Sistem Informasi Posyandu (SIP) (5)

SIP adalah tatanan dari berbagai komponen kegiatan Posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan dan partisipasi masyarakat. Format SIP terdiri dari 6 yaitu catatan ibu hamil, register bayi dan balita, register WUS dan PUS, register ibu hamil dan nifas, data Posyandu, dan data hasil kegiatan Posyandu (5). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi sekarang ini semakin canggih dan modern sehingga kemudian kebutuhan akan sebuah informasi juga semakin meluas. Apalagi jika saat ini sudah menuju pada revousi industry 4.0. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat salah satunya yaitu dengan penyediaan informasi yang cepat dan akurat, hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan penerapan

teknologi sistem informasi pada bidang pelayanan (6). Sistem informasi posyandu yang lebih canggih dan modern saat ini diperlukan, bahkan sudah sebagai suatu kebutuhan.

Sesuai studi pendahuluan yang dilakukan melalui wawancara terhadap bidan desa, terjadi permasalahan dimana data dari kader tidak tepat waktu, data diisi dalam bentuk format SIP, lalu dikirimkan ke Bidan Desa setiap 1 bulan sekali, bahkan terdapat laporan yang terkadang tidak terisi dikarenakan kurang pemahamannya kader. Jika data dalam bentuk manual ini terdapat kesalahan dan kekurangan, maka berakibat pada data Posyandu yang tidak tepat sehingga pengambilan keputusan di Desa dapat bisa salah sehingga akan mempengaruhi kebijakan dalam menanggulangi kesehatan ibu dan anak. Dalam era yang modern seperti saat ini, dimungkinkan untuk menghemat waktu dan tenaga yaitu dengan sistem komputerisasi. Namun, system inipun diharapkan bisa memudahkan para kader, maka solusi sistem dengan menggunakan aplikasi di telepon genggam dapat menjadi solusi yang lebih baik diterima. Dari beberapa identifikasi permasalahan informasi di atas serta dampak yang diakibatkan, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan SIP dalam bentuk elektronik. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi persepsi kader posyandu terkait penggunaan sistem informasi posyandu. Manfaat penelitian ini adalah memudahkan kader dan pengelola kader saat pelaporan SIP.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut memperjelas kebutuhan pengguna terkait format sistem informasi. Studi ini mempelajari terkait dengan persepsi kader posyandu yang ada di Desa terkait penggunaan system informasi Posyandu yang dilakukan di Desa. Penelitian ini dilakukan di satu Desa. Penelitian ini melihat analisis kebutuhan terkait dengan sistem informasi Posyandu menurut Sugiyono. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Subyek Penelitian dipilih menggunakan purposive sampel. Kriteria sampel yaitu kader posyandu yang memiliki kader yang sudah mengenal atau mampu dalam mengoperasikan komputer, pengalaman lebih dari 5 tahun mengelola Posyandu, dan memiliki pencatatan SIP yang baik. Dari kriteria tersebut, terpilih sebanyak 13 orang informan. Alat pengambilan data menggunakan Pedoman wawancara mendalam digunakan dalam rangka menggali dan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak terutama yang terkait dengan peran pengembangan SIP guna mendukung pemantauan kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Ngaglik 2, Sleman. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu bulan Maret sampai dengan April tahun 2022. Proses pengolahan data terdiri dari: 1) Metode pengumpulan data menggunakan FGD (Fokus Group Discussion); 2) Selanjutnya dilakukan reduksi dan kategorisasi data, yakni terkait karakteristik informan dan persepsi kader; 3) berikutnya dilakukan penampilan data secara naratif yang terdapat

pada hasil penelitian; dan 4) Dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh.

HASIL

Desa Sukoharjo terletak di kecamatan Ngaglik kabupaten Sleman memiliki luas wilayah 8,03 Km² ketinggian 270 dpl. Desa Sukoharjo memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara desa Umbulmartani, bagian selatan desa Wedomartani, sebelah timur desa Widodomartani, dan sebelah barat desa Sardonoarjo. Jumlah penduduk sejumlah 14.435 orang yang terdiri dari laki-laki 7.197 dan perempuan 7238. Desa Sukoharjo memiliki 14 padukuhan, yaitu: Yapah, Karanglo, Tanjungsari, Wonosalam, Losari, Purworejo, Bandulan, Siwil, Ngebo, Balong, Mendiro, Sembung, dan Besi. Dari 14 padukuhan Desa Sukoharjo memiliki 24 Posyandu yang memiliki kader posyandu balita sejumlah 120. Desa Sukoharjo berada di wilayah kerja Puskesmas Ngaglik 2, Sleman. Desa Sukoharjo memiliki 1 bidan desa dan 1 puskesmas pembantu, bahkan memiliki 1 desa KB di wilayah padukuhan Tanjungsari. Desa Sukoharjo terletak 16 Km kearah pusat kota Yogyakarta dari arah utara.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Kader Posyandu tentang Penggunaan Sistem Informasi Posyandu di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman

No	Karakteristik Kader Posyandu	Kriteria	Frekuensi (f)	Prosentase(%)
1	Umur	Muda (31-47 tahun)	8	62%
		Tua (48-62 tahun)	5	38%
2	Pendidikan	Tamat SMA	8	62%
		Tamat Diploma	1	8%
		Tamat Sarjana	4	31%
3	Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	9	69%
		Pedagang	1	8%
		Pegawai Swasta	2	15%
		PNS	1	8%
	Total		13	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kader berusia kategori muda (31-47 tahun) sebesar 8 orang (62%), pendidikan kader mayoritas SMA sebanyak 8 orang (62%), dan pekerjaan kader sebagian besar ibu rumah tangga sebanyak 9 orang (69%).

Persepsi Penggunaan Sistem Informasi Posyandu di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman oleh Kader Kesehatan. Pandangan kader terkait sistem informasi posyandu. Penerapan pelaporan menggunakan sistem awalnya ditolak karena kebutuhan peralatan yang diharapkan dapat dipenuhi, yaitu: HP, internet, pelatihan. Pengambilan data yang berulang dengan pandangan masyarakat yang dianggap ada hubungannya dengan bantuan. Berikut cuplikan FGD:

Informan Z: “Emm malah angel mbak” “Kadang kita mung gini aja di form itu aja kita bikin sendiri mbak, ngeprint sendiri kalau seperti ini ...” “Membutuhkan kader yang muda...” “Kalau ya mampu ya mungkin mampu”. (Hasil FGD, Maret 2022).

Informan P: “Soale ini kebanyakan ibu ibu mbak”. (Hasil FGD, Maret 2022). **Informan C:** “Faktor usia dan hp ne dan gaktek itu tadi mungkin ya, kalau hp ne dah sama semua mungkin bisa ya”. “Harus pakai hp” “He'e nggak boleh pakai kertas, nggak boleh pakai form gitu. Tapi akhirnya saya nggandeng mahasiswa” “Saya juga hp yang dulu tu gitu rodo anu, Pak ini kok macet”. (Hasil FGD, Maret 2022). **Informan P:** “Kadang nek adewe njaluk datane le mangsuli malah data opo bu, arep entuk bantuan opo. Rata rata di masyarakat seperti itu mbak”. (Hasil FGD, Maret 2022).

Jika akan adanya sistem informasi, diharapkan adanya solusi terkait kebutuhan pelatihan, fasilitas penunjang sistem informasi, dan pemilihan kader.

Berikut cuplikan FGD: **Informan Z:** *Kalau ya mampu ya mungkin mampu*”. “He'e pertama itu mbak, dan penyuluhan untuk kader semua kader, seperti penyuluhan Bu Heni tadi, ha Tolong setiap kader semuanya dikasih pelatihan atau pembinaan. Karena ya ra ketang kadere yo rodo lemot, tapi kan sudah dikasih pembinaan per posyandu, otomatis kan masing masing kader itu nanti akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya ...”. “Dan juga harus dilatih ora mung waton”. (Hasil FGD, Maret 2022). Fasilitas Penunjang Sistem Informasi. **Informan Z:** “Ya dikasih hp itu”. Nggo Pelaporan” “Tur pakete kadang jaringan itu lo mbak, sinyal”. (Hasil FGD, Maret 2022). **Informan C:** “Faktor usia dan hp ne dan gaktek itu tadi mungkin ya, kalau hp ne dah sama semua mungkin bisa ya”. “Tapi kadang kadang gini Hp ku lemot”. “Satu padukuhan satu, misale gitu”. (Hasil FGD, Maret 2022). **Informan W:** “Sing penting dikasih laptop po opo. Yang penting terfasilitasi”. (Hasil FGD, Maret 2022).

Kader yang dilatih. **Informan Z:** “...kita kasih yang agak muda, yang mau. Jadi bukan hanya koordinatornya, nanti yang dikasih tu yang agak muda dan dia mau. nah ki lo mbak pendataane seperti ini, nah mengko yang data ada sendiri itu mungkin bisa. Tapi kader yang sudah ikut tertentu, kalau yang tidak ikut sulit”. (Hasil FGD, Maret 2022). **Informan C:** “Seandainya kudu blangko tak lebokke nang bocah sing iso nyekeli, nde'e sing kari nginfo....”. (Hasil FGD, Maret 2022).

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini membahas bagaimana pandangan atau persepsi kader posyandu jika pelaporan posyandu dikembangkan menggunakan system informasi posyandu. Hal ini menjawab kesulitan data yang menjadi kendala dari bidan desa terkait data posyandu pada wawancara study pendahuluan. Sistem informasi merupakan sebuah kombinasi antara manusia dan perangkat

teknologi berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu organisasi (7) .

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Desa di kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang memfokuskan stunting sebagai salah satu program dengan perhatian khusus. Terbukti dengan diterbitkannya Perbup Sleman nomor 22.1 tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting terintegrasi, dimana fokus mobilisasi balita ke posyandu dan memantau pertumbuhan setiap bulannya (8) .Tentu saja hasil dari pemantauan pertumbuhan harus segera dilaporkan dengan cepat dan akurat, maka sistem informasi yang terpadu bisa menjadi sebuah solusi. Terkait system informasi Posyandu di wilayah Sleman juga telah dilaksanakan sebelumnya di Desa Margoagung, Sayegan. Sistem informasi tersebut berdasarkan web based dan aplikasi android, telah terintegrasi dan terlaksananya pelatihan untuk para kader (9) . Dari hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diciptakan sistem informasi dan dapat digunakan oleh kader. Dengan banyaknya perhatian, program stunting di Sleman ternyata mampu menurunkan angka stunting dalam 3 tahun terakhir (10).

Informan pada penelitian ini terdiri atas: kader, perangkat desa, dan bidan desa, dengan total subyek penelitian/informan berjumlah 13 orang. Kader kesehatan yang memenuhi kriteria inklusi dengan minimal pengalaman menjadi kader adalah 5 tahun, memahami pelaporan posyandu, serta memiliki pelaporan Posyandu yang baik. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki usia 31-47 tahun, berpendidikan SMA, dan dengan pekerjaan sebagian besar ibu rumah tangga. Kader posyandu merupakan orang yang dengan sukarela dipilih oleh masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat (1). Kader posyandu merupakan proses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Posyandu. Kebutuhan kegiatan Posyandu yang sangat beragam memiliki sumber daya yang baik dengan minimal Sebagian besar berpendidikan SMA.

Usia memiliki peranan penting dalam kegiatan menjadi kader, usia tersebut termasuk Sesuai dengan penelitian Sukandar dkk penelitian yang dilakukan di kecamatan Soreang Bandung, bahwa sebagian besar usia kader diusia 40-49 tahun. Usia tersebut memiliki tingkat aktivitas tinggi. Hal ini sesuai dengan Havighurts Developmental Theory dalam Sukandar dkk yang menyebutkan bahwa usia tersebut masuk kedalam kategori usia produktif dimana tanggungjawab yang ada pada kategori usia tersebut adalah tanggungjawab kemasyarakatan. Sehingga, pada usia tersebut seseorang lebih banyak memilih berperan aktif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan(11). Dengan usia tersebut memang terdapat kendala dalam proses pelaksanaan tugas menjadi kader. Seperti halnya yang telah dilakukan penelitian oleh Khasanah N, dkk di Yogyakarta, dengan usia diatas 35 tahun menjadikan kader sebagian besar sudah memasuki usia menopause. Dengan kondisi tersebut, maka kemampuan berpikir dan mengingat mulai melemah (12) .

Sebagian besar usia informan yaitu SMA, yakni telah melebihi dari standar wajib belajar 9 tahun dari Pemerintah. SMA merupakan jenjang yang diusulkan wajib belajar 12 tahun rekomendasi dari kebijakan Pendidikan menengah universal (13). Menurut Rabiattunnisa dkk,

dengan pendidikan tinggi seseorang akan semakin luas dan mempunyai motivasi yang baik (14). Hal tersebut sesuai dengan kondisi kader yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam tugasnya menjadi seorang kader posyandu di masyarakat. Secara standar Pendidikan dianggap cukup untuk dapat memberikan support kepada posyandu.

Pekerjaan kader posyandu sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Secara umum ibu rumah tangga di desa ini memiliki aktifitas sebagai kader, aktivis PKK dan dasawisma, memanfaatkan media saat sore dan waktu senggang, acara kerohanian, media yang digemari adalah TV dan media sosial. Pekerjaan kader paling umum yaitu ibu rumah tangga, hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki oleh ibu tersebut ada dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi kader di posyandu. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Setiasih dkk yang mengatakan bahwa mayoritas latar belakang kader di PAUD yakni ibu rumah tangga yang memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak usia dini (15). Kepedulian ini lah yang menjadi modal awal seorang kader dengan pekerjaan ibu rumah tangga menjadi lebih konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pandangan kader terkait sistem informasi posyandu. Penerapan pelaporan menggunakan system awalnya ditolak karena kebutuhan peralatan yang diharapkan dapat dipenuhi, yaitu: HP, internet, pelatihan. Informan sebetulnya merasa keberatan dengan beban yang harus di kerjakan sebagai kader Posyandu. Hal ini tertera dalam cuplikan FGD dengan alasan sebagai berikut:

Informan Z: “Emm malah angel mbak” “Membutuhkan kader yang muda...”. **Informan P:** “Soale ini kebanyakan ibu ibu mbak”. **Informan C:** “Faktor usia dan hp ne dan gptek itu tadi mungkin ya, kalau hp ne dah sama semua mungkin bisa ya”. **Informan P:** “Kadang nek adewe njaluk datane le mangsuli malah data opo bu, arep entuk bantuan opo. Rata rata di masyarakat seperti itu mbak”. (Hasil FGD, Maret 2022).

Dari diskusi tersebut diketahui adanya penolakan apabila menggunakan sistem informasi dikarenakan: mempersulit proses pelaporan, butuh kader yang muda (usia), usia ibu-ibu (tidak muda), gagap teknologi (sulit menerima teknologi), Handphone yang memiliki fitur yang sama, dan persepsi masyarakat yang menganggap ada hubungannya dengan bantuan jika dimintai data. Pengkategorian permasalahan tersebut bisa dilihat dari 2 hal besar yaitu:

Secara internal (dalam diri sendiri) dapat terdiri dari: Kemampuan, terdiri atas: kader yang ada dianggap sudah tua, proses pelaporan yang dianggap sulit, dan gagap teknologi, Alat yang dimiliki, handphone yang dimiliki belum memiliki fitur yang sama. Secara eksternal (lingkungan) yakni adanya persepsi masyarakat yang menganggap ada hubungannya dengan bantuan jika dimintai data.

Dengan pengalaman berbeda-beda yang dimiliki oleh kader tentunya setiap individu memiliki persepsi terhadap penggunaan system informasi ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk, melihat efikasi diri pada pendamping system informasi posyandu, ternyata terdapat menurut Bandura dalam Rahman dkk terdapat tiga dimensi pada efikasi diri yaitu magnitude, strength, dan generality (1982). Hasil penelitain menunjukkan dimensi magnitude atau

tingkat kesulitan dalam melakukan tugas terdapat 8 responden tidak mengalami perubahan pada dimensi magnitude. Dalam hal ini, Kader yang umumnya jarang atau bahkan tidak terpapar dengan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi/komputer tentu tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak sehingga berpengaruh terhadap efikasi dirinya. (16).

Dari pemaparan diatas diulas masalah yang dianggap kader belum semua bisa menerima system informasi. Namun, dalam sesi FGD juga ditanyakan apa yang memungkinkan agar system informasi tersebut dapat diterima di masyarakat. Dari hasil FGD didapatkan solusi jika akan adanya system informasi, diharapkan adanya solusi terkait kebutuhan pelatihan, fasilitas penunjang system informasi, dan pemilihan kader yang mampu dalam pengisian pelaporan Posyandu dengan system. Berikut ringkasan ulasan dari hasil FGD:

Pelatihan **Informan Z**: *“He'e pertama itu mbak, dan penyuluhan untuk kader semua kader, seperti penyuluhan Bu Heni tadi, ha Tolong setiap kader semuanya dikasih pelatihan atau pembinaan. Karena ya ra ketang kadere yo rodo lemot, tapi kan sudah dikasih pembinaan per posyandu, otomatis kan masing masing kader itu nanti akan bisa menyesuaikan dengan sendirinya ...”*. Fasilitas Penunjang Sistem Informasi **Informan Z**: *“Ya dikasih hp itu”. Nggo Pelaporan” “Tur pakete kadang jaringan itu lo mbak, sinyal”*. **Informan C**: *“Faktor usia dan hp ne dan gaktek itu tadi mungkin ya, kalau hp ne dah sama semua mungkin bisa ya”*. *“Tapi kadang kadang gini Hp ku lemot”*. *“Satu padukuhan satu, misale gitu”*. **Informan W**: *“Sing penting dikasih laptop po opo. Yang penting terfasilitasi”*.

Kader yang dilatih **Informan Z**: *“...kita kasih yang agak muda, yang mau. Jadi bukan hanya koordinatornya, nanti yang dikasih tu yang agak muda dan dia mau. nah ki lo mbak pendataane seperti ini, nah mengko yang data ada sendiri itu mungkin bisa. Tapi kader yang sudah ikut tertentu, kalau yang tidak ikut sulit”*. (Hasil FGD, Maret 2022). Dari hasil ringkasan ulasan tersebut, maka diambil kesimpulan kebutuhan jika system informasi diterapkan harus dapat memfasilitasi: (1). Fasilitas penunjang system informasi: dapat berupa Handphone ataupun laptop yang dapat difasilitasi, agar fitur yang menunjang sama, sehingga pelaporan akan lebih efektif. (2). Internet yang menunjang, (3). Kader yang dilatih. Diharapkan kader yang lebih muda dan mau dilatih atau berkontribusi untuk Posyandu. (4). Pelatihan kader ketika sistem informasi akan diterapkan., bahkan diharapkan sampai dengan pembinaan.

Terkait penggunaan system informasi agar dapat digunakan dengan maksimal tentunya harus didukung dengan support alat agar system informasi tersebut dapat digunakan oleh kader. Seperti penggunaan system informasi posyandu lansia yang dilaksanakan oleh Kusumadewi dkk bahwa system informasi dapat digunakan system yang berbasis android, dengan spesifikasi handphone yang dapat digunakan yaitu: Sistem Operasi Android 9.0 Ke atas, RAM memiliki 1GB, Processor disarankan 1.2 Ghz ke atas, memiliki Koneksi Internet, memiliki setidaknya kapasitas 50Mb dipenyimpanan handphone, dan memiliki ukuran layar minimal 5.5 inch. Kebutuhan tersebut jika terpenuhi, performa dari sistem informasi akan lebih optimal (17).

Dari alat yang dipersiapkan dengan matang tentunya akan dapat mengoptimalkan proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yakni suatu proses anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, sehingga nantinya masyarakat menjadi komunitas yang memiliki ketahanan dalam berbagai sektor dalam lini kehidupan. Konsep pemberdayaan dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan sosial. Orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan harus mampu lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri (18). Sistem informasi dapat digunakan dengan optimal sesuai kebutuhan yang dikehendaki oleh pengguna, maka pemberdayaan di masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Kader secara teknis memiliki tugas terkait dengan gizi yakni melakukan pendataan balita, melakukan penimbangan dan mencatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), memberikan makanan tambahan, mendistribusikan vitamin A, melakukan penyuluhan gizi serta kunjungan ke rumah ibu yang menyusui dan ibu yang memiliki balita. Kader diharapkan berperan aktif dan mampu menjadi pendorong, motivator dan penyuluh masyarakat. Kader diharapkan dapat menjembatani antara petugas/ahli kesehatan dengan masyarakat serta membantu masyarakat mengidentifikasi dan menghadapi/menjawab kebutuhan kesehatan mereka sendiri (19). Berperan aktif dan dapat menjembatani masalah dari masyarakat kepada Puskesmas itu yang dilakukan keseharian dari kader. Sehingga kegiatan yang sekiranya selalu dilakukan terkait pencatatan yang menggunakan system informasi, sudah dipastikan dapat memudahkan kader untuk melakukan kegiatan yang lain, terutama memberdayakan masyarakat untuk Bersama-sama menjaga kesehatan.

Proses dari pemberdayaan masyarakat yang paling utama yakni memberikan keilmuan yang sesuai, dalam hal ini adalah kader Posyandu. Kader yang dilatih tentunya dapat dipilih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sesuai dengan harapan kader pada forum diskusi, bahwa kader sebaiknya yang memiliki kemampuan dan diberi pelatihan. Melalui pelatihan maupun Pendidikan kesehatan dapat mengubah pengetahuan, sikap, bahkan perilaku dari kader. Sesuai penelitian Anggraini dan Ekawati menyebutkan bahwa adanya pengaruh diberikannya pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan dan perilaku kader dalam pemantauan tumbuh kembang balita (20). Namun berbeda pada penelitian Widaryanti R dan Rahmuniyati, ME, yang melaksanakan evaluasi pelatihan pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kader masih belum optimal mengimplementasikan hasil PMBA, dengan kendala yang dihadapi kader (21). Tentu saja ketika kita melihat bahwa kader memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap wilayahnya. Kader yang dipilih adalah seorang wanita dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dapat menjadi solusi pemberdayaan yang optimal. Terbukti dari penelitian Novianti dkk, bahwa Ibu-ibu rumah tangga yang dipilih dalam penelitian tersebut karena ibu-ibu rumah tangga merupakan pilar rumah tangga dalam keluarga. Apabila pilar ini kuat, maka rumah tangga tersebut akan kokoh. Benteng pertama bagi generasi penerus adalah keluarga, untuk itu ibu-ibu rumah tangga perlu dibekali pendidikan literasi media. Terbukti juga bahwa Ibu-ibu rumah tangga di Banguntapan Bantul yang telah dipilih berhasil menjadi agen-agen sosialisasi pendidikan literasi

media digital di lingkungannya. Mereka secara aktif dan suka rela memberikan pengarahan sosialisasi literasi (22). Pemberian pelatihan juga efektif meningkatkan ketrampilan bagi petugas kesehatan (23). Sehingga sangat efektif apabila sistem informasi ini dilaksanakan oleh kader, apalagi jika dibekali oleh pelatihan maupun pendidikan kesehatan.

KESIMPULAN

Artikel ini mengulas terkait dengan persepsi kader terkait sistem informasi posyandu. Penerapan pelaporan menggunakan system awalnya ditolak dengan 2 alasan secara internal dan eksternal. Namun ada usulan solusi yang diusulkan oleh kader agar sistem informasi dapat tetap berjalan nantinya, berupa: kebutuhan alat yakni HP atau laptop, internet, pelatihan. Usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat proses system informasi yang akan dijalankan nantinya. Saran di berikan untuk kepala Desa Sukoharjo Diharapkan untuk dapat memberikan support kepada kebutuhan Posyandu, utamanya pada pelaporan data, yang nantinya dapat digunakan untuk pendataan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes RI. Buku : Saku Posyandu [Internet]. Promosi Kesehatan Kemenkes RI. 2012 [cited 2022 Aug 19]. 1–33 p. Available from: <https://promkes.kemkes.go.id/buku-saku-posyandu>
2. Kemenkes RI. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemenkes RI May 22, 2022 p. 1–592.
3. Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden Republik Indonesia 2021 p. 1–75.
4. Dinkes DIY. Profil Kesehatan DIY Tahun 2021. 2022. 1–168 p.
5. Kemenkes RI, Pokjanel Posyandu Pusat. Kurikulum dan Modul pelatihan Kader Posyandu. 2012.
6. Kristania YM, Yulianti FD. Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pada Posyandu pepaya Purwokerto. Jurnal Evolusi [Internet]. 2019 [cited 2023 Jan 3];7(1):68–75. Available from: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/5015/3097>
7. Harijanto B, Putri IK, Hani'ah M, Wijyaningrum VN, Ratsanjani MH, Malang N. Pengembangan Sistem Informasi Tumbuh Kembang Balita di Posyandu Rajawali kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jurnal Abdimas Bela Negara. 2021;2(2):48–61.
8. Bupati Sleman. Peraturan Bupati Sleman Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Peraturan Bupati Sleman 2021 p. 1–15.

9. Verawati I, Rahmat TK. Pembuatan Sistem Informasi E-Posyandu berbasis Website. In: Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019 Universitas Amikom. 2019. p. 464–9.
10. Saputro FA, Assidiq Y. Tren Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sleman Alami Penurunan. *Republika Jogja*. 2022. p. 1–1.
11. Sukandar H, Faiqoh R, Sulaeman Effendi J. Hubungan Karakteristik terhadap Tingkat Aktivitas Kader Posyandu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. *Jurnal Sistem Kesehatan (JSK)*. 2019;4(3):102–9.
12. Khasanah N, Indrayani N, Massolo S. Pemberdayaan Kader Posyandu Melalui Kelas Wani MPASI Sebagai Upaya Anti Stunting dan Anti Anemia Berbasis Bahan Pangan Lokal di Yogyakarta. In: Seminar Nasional Unriyo [Internet]. 2020 [cited 2023 Jan 3]. p. 564–73. Available from: <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/view/327/319>
13. Wicaksono A, Siska Y. Wajib Belajar 12 Tahun Rekomendasi Kebijakan Menengah Universal (PMU). In: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang [Internet]. 2020 [cited 2023 Jan 3]. p. 844–58. Available from: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1628534&val=12987&title=WAJIB%20BELAJAR%2012%20TAHUN%20REKOMENDASI%20KEBIJAKAN%20PENDIDIKAN%20MENENGAH%20UNIVERSAL%20PMU>
14. Rabiattunnisa, Mujahadatuljannah, Araya T, Lestari M. Hubungan Peran Kader Posyandu Balita dengan Motivasi Ibu Melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap. *Jurnal Surya Medika (JSM)* [Internet]. 2022;8(2):251–6. Available from: <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jsm>
15. Setiasih, B A, S AE. Peningkatan Kompetensi Kader Taman Posyandu Berlatar Belakang Ibu Rumah Tangga. *Ngayah Majalah Aplikasi IPTEKS* [Internet]. 2018 [cited 2023 Jan 2];59–68. Available from: http://repository.ubaya.ac.id/33685/1/Peningkatan%20Kompetensi%20Kader%20Taman%20Posyandu_Setiasih_2018.pdf
16. Rahman LOA, Handiyani H, Chandra M. Pendampingan Sistem Informasi Posyandu Terintegrasi Meningkatkan Efikasi Diri. *Bidan Prada: Jurnal Publikasi Kebidanan* [Internet]. 2019 [cited 2023 Jan 3];10(1):150–9. Available from: <https://ojs.stikesylpp.ac.id/index.php/JBP/article/view/503>
17. Kusumadewi S, Kurniawan R, Marfianti E, Khodzim A. Edukasi Masyarakat Tentang Pemanfaatan Aplikasi Kesehatan Online Melalui Partisipasi Pengembangan Sistem Informasi. *JPPM LPIP UMP*. 2020;4(2):337–334.
18. Hilman YA, Nimasari EP. Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *Aristo Journal* [Internet]. 2018 Jan 2 [cited 2023 Jan 3];4(1):45–67. Available from: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/778/597>
19. Iswarawanti DN. Kader Posyandu: peranan dan Tantangan Pemberdayaannya Dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*. 2010;13(4):169–73.
20. Anggraini TNYA, Ekawati. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan dan Perilaku Kader Dalam Pemantauan Tumbuh Kembang Balita. *Media Ilmu Kesehatan*. 2019;8(3):237–44.
21. Widaryanti R, Rahmuniyati ME. Evaluasi Pasca Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Pada Kader Posyandu Terhadap Peningkatan Status Gizi Bayi dan

- Balita. Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati [Internet]. 2019;4(2):163–74. Available from: <http://formilkesmas.respati.ac.id>
22. Novianti D, Fatonah S. Literasi Media Digital di Lingkungan Ibu-Ibu Rumah Tangga di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 2018;16(1):1–14.
 23. Pascawati, N.A., Susanto, N., Rosdewi, N.N., Rusyani YY. Efektivitas Pelatihan Sistem Surveilans bagi Alumni dengan Metode Online. *J Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati*. 2022;7(2):107–18.